

**ABSTRAK**

Uni Eropa memutuskan menerima keanggotaan Kroasia pada tahun 2013 melalui kerangka kebijakan *enlargement*. Pada dasarnya, kebijakan tersebut sesuai dengan *Treaty of European Union* yang menyatakan bahwa semua negara Eropa dapat bergabung dengan Uni Eropa apabila mampu menjunjung dan mempromosikan nilai demokrasi. Kebijakan tersebut juga didukung dengan adanya Agenda *Thessaloniki* yang menyatakan bahwa semua negara Balkan Barat, termasuk Kroasia, memiliki masa depan di Uni Eropa. Akan tetapi, aksesori atau keanggotaan Kroasia ini menuai kritik, baik dalam badan Uni Eropa sendiri, maupun di kalangan pengamat. Hal ini karena kondisi Kroasia yang belum memenuhi syarat politik dan ekonomi keanggotaan dan Uni Eropa tengah mengalami krisis saat aksesori tersebut. Banyak pengamat melihat anomali tersebut sebagai upaya Uni Eropa mencegah konflik terbuka antarnegara di wilayah Balkan Barat sebagaimana Uni Eropa merupakan stabilisator wilayah Eropa dan Kroasia merupakan pemeran penting konflik di Balkan Barat. Oleh karena itu, penelitian ini melihat dari kacamata yang berbeda yaitu dari aspek supranasionalisme institusi Uni Eropa dalam pengambilan kebijakan *enlargement*, yang masih berkaitan dengan kekuatan transformatif dan normatif Uni Eropa. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti menghasilkan dua argumen bahwa keputusan Uni Eropa menerima keanggotaan Kroasia pada tahun 2013 meski dalam kondisi belum memenuhi kriteria didasari oleh kepentingan untuk menjadikan proses aksesori Kroasia sebagai *pilot* bagi negara-negara Balkan Barat dalam menerima norma-norma Uni Eropa dan untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan *enlargement* di negara-negara Balkan Barat lainnya.

**Kata Kunci:** Uni Eropa, *enlargement*, Kroasia, Balkan Barat, Transformasi, aksesori, keanggotaan